

BAB I

PENDAHULUAN

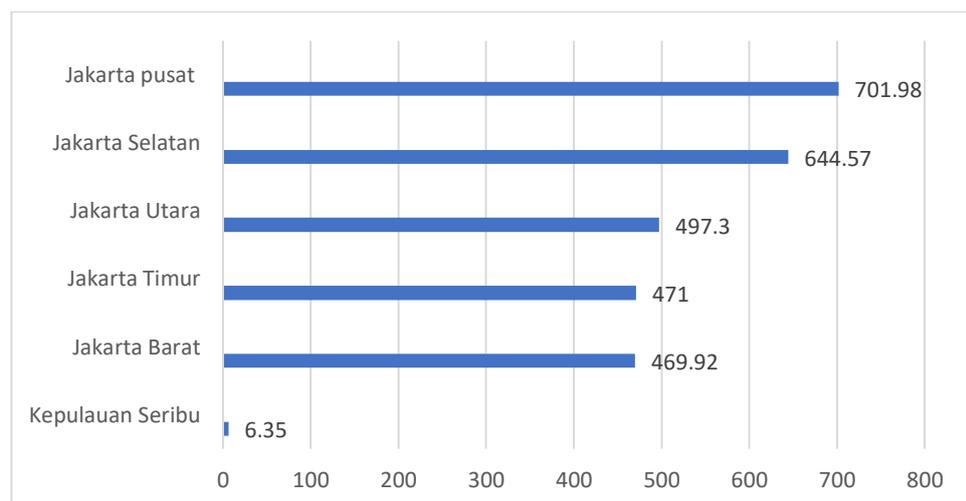
1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan adalah upaya untuk mentransformasi kehidupan kearah yang lebih baik. Salah satu pembangunan nasional yang mendapatkan perhatian pemerintah adalah pembangunan ekonomi. Pada hakikatnya pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijaksanaan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, meratakan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan regional, dan melalui pergeseran struktur kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder. . Menurut Todaro dalam Esther Kembauw, Lexy J. Sinay dan Aphrodite M. Sahusilawane tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi selain menciptakan pertumbuhan yang setinggi-tingginya, harus pula menghapus atau mengurangi tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Pertumbuhan ekonomi adalah Sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB). Karena untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi tergantung pada kemampuan daerah tersebut dalam memobilisasi sumber daya yang terbatas, sehingga mampu melakukan perubahan structural yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Pertumbuhan ekonomi bisa dipandang

sebagai masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Menurut Sadono Sukirno, untuk memberikan suatu gambaran kasar mengenai pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara, ukuran yang selalu digunakan adalah tingkat pertumbuhan pendapatan nasional riil yang dicapai.

DKI Jakarta sebagai kota yang maju, terus melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, tanpa harus mengabaikan usaha pemerataan dan kestabilan. Pembangunan ekonomi suatu daerah bisa dikatakan meningkat hanya dengan melihat dari pertumbuhan ekonominya. Jika pertumbuhan ekonomi tiap tahunnya meningkat maka dikatakan pembangunan ekonominya juga meningkat. Menurut para ekonom, dalam (Ronald & Sarmiyatiningsih, 2010), pertumbuhan ekonomi dikatakan sebagai kenaikan PDRB tanpa harus memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk



Gambar 1. 1 Pertumbuhan Ekonomi di DKI Jakarta dengan PDRB Tahun 2019 (Triliun)

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada gambar diatas bisa dikatakan bahwa Jakarta Pusat adalah pertumbuhan ekonomi terbesar di Provinsi DKI Jakarta sebesar 701,98 triliun. Karena di Jakarta Pusat mayoritas pekerjaan masyarakatnya menjadi karyawan di kantor, sedangkan di daerah Kepulauan seribu pertumbuhan ekonominya yang paling kecil jika dibandingkan dengan ke5 daerah lainnya, yaitu sebesar 6,35 triliun saja. Ini mungkin juga terjadi karena di daerah Kepulauan Seribu mayoritas pekerjaan masyarakatnya adalah nelayan.

Terori Pertumbuhan Ekonomi Neo Klasik menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan (PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-Faktor produksi yaitu tenaga kerja, modal, dan teknologi. Salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi adalah investasi. Investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman-penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Investasi merupakan salah satu komponen dari pen geluaran agregat. Maka kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional.

Investasi dapat dipengaruhi oleh investasi asing dan domestic. Investasi yang terjadi di daerah terdiri dari investasi pemerintah dan investasi swasta. Investasi dari sektor swasta adalah investor yang berasal dari luar negeri (PMA) dan investor yang berasal dari dalam negeri (PMDN). Sementara itu, investasi pemerintah dilakukan untuk menyediakan barang publik. (Fuazan, 2015)

Kenaikan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta, pasti tidak lepas dari peranan investasi yang ditanamkan di wilayah tersebut. Investor dari luar negeri (PMA) maupun investor dari dalam negeri (PMDN), Di DKI Jakarta bisa dilihat dari nilai realisasi investasi maupun presentase laju investasi yang ditunjukkan pada tabel 1.1.

Tabel 1. 1

Realisasi dan Presentase Laju Pertumbuhan Investasi Di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2015

Tahun	PMDN		PMA	
	Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)	Investasi (Juta Rupiah)	Pertumbuhan (%)
2010	4.598,5	7,48	6.428,7	24,65
2011	9.256,4	15,06	4.824,0	18,50
2012	8.540,0	13,89	4.107,7	15,75
2013	5.754,4	9,36	2.589,6	9,93
2014	17.811,4	28,97	4.509,4	17,29
2015	15.512,7	25,23	3.619,3	13,88

Sumber : Open Data Jakarta (diolah)

Berdasarkan tabel 1.1, Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) selama periode 2010-2015 berfluktuasi. Realisasi PMDN di DKI Jakarta meningkat dari tahun 2010 sebesar \$ 4,5 juta menjadi 8,5 juta di tahun 2012, lalu pada tahun 2013 PMDN turun menjadi \$ 5,7 juta (9,36%). Dan di tahun 2014 PMDN mengalami kenaikan lagi yang cukup besar, sebesar 17,8 juta (28,97%), kemudian mengalami penurunan lagi di tahun 2015 menjadi 15,5 juta (25,23%). Sementara itu, kondisi realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) periode 2010-2015 juga berfluktuasi. Dari tahun 2010 PMA mengalami penurunan sebesar 6,4 juta menjadi 4,8 juta ditahun 2011 (18,50%) dan mengalami penurunan lagi di tahun 2012 sebesar 4,1 juta (15,75%) dan kembali mengalami penurunan di tahun 2013 menjadi 2,5 juta (9,9%) . Di tahun 2014 meningkat lagi sebesar 4,5 juta (17,29%), tetapi di tahun 2015 akhirnya mengalami penurunan lagi menjadi 3,6 juta

(13,88%). Berfluktuasi realisasi PMA dan PMDN selama periode 2010-2015 karena para investor yang belum sepenuhnya percaya untuk berinvestasi di DKI Jakarta karena kondisi perekonomian, sosial, politik, dan keamanan belum stabil.

Perkembangan investasi di DKI Jakarta pada tahun 2021 sudah membaik dengan seiring dengan mulai berjalannya Proyek Startegi Nasional di Jakarta Selatan karena sebelumnya sempat tertunda akibat refocusing anggaran infrastruktur.

Faktor lain yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi adalah jumlah dari tenaga kerja. Tenaga Kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Angkatan kerja yang bekerja merupakan gambaran kondisi dari lapangan kerja yang tersedia. Semakin bertambah besar lapangan kerja yang ada maka akan semakin meningkatkan total produksi di suatu daerah.

Tabel 1. 2

Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Perkembangan Angkatan Kerja Di DKI Jakarta Tahun 2018-2020

Tahun	Angkatan Kerja				Total
	Bekerja	Pertumbuhan (%)	Mencari Kerja	Pertumbuhan (%)	
2018	4.726.779	33,23	314.841	26,05	5.041.620
2019	4.836.977	34,01	320.901	26,55	5.157.878
2020	4.659.251	32,76	572.708	47,39	5.231.959

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah orang yang bekerja tahun 2018-2020 berfluktuasi. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah orang yang bekerja di tahun 2019, dari 4,72 juta jiwa di tahun 2018 menjadi 4,84 juta jiwa di tahun 2019, setelah itu terjadi penurunan di tahun 2020 dari 4,84 juta jiwa menjadi 4,66 juta jiwa di tahun 2020. Sementara itu, jumlah orang yang sedang mencari kerja mengalami peningkatan dari tahun 2018-2020. Di tahun 2018, jumlah orang yang sedang mencari kerja sebesar 314 juta jiwa dan terus mengalami kenaikan sampai tahun 2020 sebesar 572 juta jiwa. Hal ini memberikan indikasi bahwa provinsi DKI Jakarta masih kekurangan dalam menyediakan lapangan kerja baru setiap tahunnya, sehingga masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta pada triwulan I 2021 yang masih berkontraksi berakitan erat dengan penurunan angka penduduk bekerja di DKI Jakarta pada periode Februari 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Turunnya jumlah orang bekerja disebabkan oleh turunnya jumlah pekerja di sektor formal, begitupun sebaliknya jumlah pekerja di sektor informal mengalami kenaikan. Keadaan perekonomian DKI Jakarta pada Februari 2021 sudah lebih membaik jika dibandingkan pada Agustus 2020 karena terdampak COVID-19.

Indikator lainnya dalam pertumbuhan ekonomi adalah tingkat Pendidikan. Tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator organisasi dalam menentukan pencapaian hasil kerja. Kualitas sumber daya tidak terlepas adanya penempatan posisi tenaga kerja agar sesuai dengan keahlian dan pendidikan yang diikuti supaya

tujuan organisasi tercapai secara optimal. Dengan Pendidikan dapat diperoleh gambaran tentang pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki tenaga kerja.

Teori *human capital* menjelaskan pentingnya meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan peningkatan Pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas dapat memberikan *multiplier effect* terhadap pembangunan suatu daerah, khususnya pembangunan bidang ekonomi. Apabila kualitas sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan, maka produktivitas penduduk akan meningkat. Upaya dalam mengukur tingkat Pendidikan atau kualitas sumber daya manusia nya melalui bebetapa pendekatan, salah satunya dari Rata-rata Usia Lama Sekolah (RLS). RLS ini melihat rata-rata usia lama sekolah yang ditempuh oleh pnduduk berusia produktif, yaitu berusia 15 tahun keatas. Semakin tinggi angka RLS di suatu daerah maka akan semakin baik kualitas SDM yang dimilikinya.

Tabel 1. 3

Rata-rata Lama Sekolah Berusia 15 Tahun Keatas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Diutamakan Provinsi DKI Jakarta 2016-2017 (Tahun)

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah
2015	10.70
2016	10.88
2017	11.02
2018	11.05
2019	11.06
2020	11.13

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta

Tabel 1.3 menjelaskan bahwa rata-rata lama sekolah di Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan selama periode 2015-2020. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya RLS pada tahun 2015 sebesar 10,70 tahun menjadi 11,13 tahun pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa RLS Provinsi DKI Jakarta mempunyai

kualitas Pendidikan masyarakatnya yang sangat baik, karena selama lima tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Kenyataannya tingkat Pendidikan Angkatan kerja di DKI Jakarta relative tinggi, karena penduduk tamatan SMA dan perguruan tinggi lebih banyak dibandingkan dengan tamatan SD dan SMP. Hal ini mengindikasikan bahwa sudah maksimalnya Tingkat Pendidikan di DKI Jakarta.

Pertumbuhan ekonomi juga tidak dapat terlepas dari peran pemerintah dalam menyediakan dana untuk membiayai kegiatan pembangunan di bidang ekonomi maupun non ekonomi. Biaya kegiatan ini sering disebut pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah terdiri dari kebijakan fiskal yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/wilayah. Semakin meningkat pengeluaran pemerintah daerah yang produktif maka semakin meningkat pula perekonomian suatu daerah. Salah satu pengeluaran pemerintah yang produktif adalah pengeluaran untuk sector Pendidikan (Citra Ayu Basica Effendy Lubis, 2014)

Tabel 1. 4

Realisasi Pengeluaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2020-2019 (Juta Rupiah)

Tahun	Pengeluaran				Total
	Belanja	Pertumbuhan (%)	Pembiayaan	Pertumbuhan (%)	
2016	47.124.422	29,65	4.543.144	21,28	5.041.620
2017	50.721.960	31,92	9.303.641	43,57	5.157.878
2018	61.063.848	38,43	7.505.956	35,15	5.231.959

Sumber : BPS Provinsi DKI Jakarta (diolah)

Tabel 1.4 terlihat tahun 2018 dalam pengeluaran pemerintah belanja langsung dan belanja tidak langsung mengalami kenaikan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu sebesar 61.063.848. Dan untuk pembiayaan daerahnya terbesar pengeluarannya terjadi di tahun 2017 sebesar 9.303.641 tetapi di tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan lagi dikarenakan realisasi belanja daerah yang besar masih belum mampu mendorong tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi DKI Jakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah masih berfluktuasi karna masih kurang stabilnya pengeluaran pemerintahnya

Teori mengatakan bahwa kenaikan investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan maupun pengeluaran pemerintah bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka dari itu, fakta yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa pada saat investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah mengalami penurunan pertumbuhan tidak langsung berakibat pada kondisi pertumbuhan ekonomi yang menurun.

Dari latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk menguji sejauh mana pengaruh investasi, jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta. Sehingga nantinya dapat membantu kebijakan yang tepat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019?
2. Bagaimana pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara parsial terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019.
2. Untuk mengetahui pengaruh investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah secara simultan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019.

1.4 Manfaat Hasil Penelitian

Hasil penelitian yang diperoleh, diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis, memberikan tambahan wawasan bagi penulis mengenai tingkat pendidikan tenaga kerja Provinsi DKI Jakarta dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta.
2. Bagi Mahasiswa, diharapkan dengan adanya penelitian ini mampu menambah wawasan mahasiswa. Mengenai investasi, tenaga kerja, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta tahun 2005-2019. Selain itu, dapat dijadikan perbandingan penelitian selanjutnya, khususnya penelitian yang sejenis.
3. Bagi Pemerintah, sebagai ilustrasi serta bahan usulan kebijakan pemerintah untuk kedepannya.
4. Bagi Pihak Lain, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan serta menjadi salah satu referensi bagi penelitian selanjutnya.

1.5 Lokasi dan Jadwal Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian dengan data sekunder yaitu, investasi di DKI Jakarta, jumlah tenaga kerja DKI Jakarta, tingkat pendidikan dan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan di DKI Jakarta, melalui website resmi dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS).

1.5.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak bulan Oktober 2021 diawali dengan pengajuan judul kepada pihak prodi Ekonomi Pembangunan. Kemudian, mencari data dan

teori yang selaras dengan judul yang diangkat, serta menganalisis penelitian terdahulu.

Tabel 1. 5 Matriks Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

No.	Kegiatan	Bulan/Tahun 2021-2022																							
		Nov				Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan usulan penelitian	■	■	■	■																				
2	Pengajuan usulan penelitian					■	■	■	■																
3	Sidang usulan penelitian									■	■	■	■												
4	Pengumpulan data									■	■	■	■	■	■	■	■								
5	Analisis data									■	■	■	■	■	■	■	■								
6	Penulisan BAB V dan Vi													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
7	Sidang skripsi																					■	■	■	■
8	Revisi skripsi																					■	■	■	■